

Polri Yang Dicintai Dan Dipercaya Masyarakat

Oleh : Mayjen Pol. Drs. Bibit S. Rianto MM. Koorsahli Kapolri

PENGANTAR

Rujukan pertemuan Kapolri dengan tokoh masyarakat, pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kediaman Dinas Kapolri, mendapatkan tanggapan yang cukup positif dan kesempatan tersebut digunakan mereka untuk menyampaikan "Uneg-uneg" mereka yang terkesan

menuntut Polri untuk berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain :

Membersihkan diri dari Kolusi dan Korupsi, yang antara lain diungkapkan dengan masih adanya pungli di jalan, pungli di tempat-tempat pelayanan, masih dijumpai manipulasi (koersialisasi) penanganan kasus sehingga masyara-



kat kurang mendapatkan keadilan dan tidak mempercayai lagi Polisi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kapolri *lapor ayam keluar kambing*.

Menghilangkan keragu-raguan dalam bertindak dan terkesan lamban dalam menangani kasus-kasus perjarahan, pembunuhan berantai di Jawa Timur (dukun santet), perkelahian massal di Kupang antara warga Timtim dengan Timbar, Referendum dan Integrasi di Timtim dan lain-lain, yang menimbulkan keresahan masyarakat dan polemik di media massa.

Meningkatkan kepedulian Polri dalam menangani masalah lalu lintas (kemacetan) di Jakarta dan masalah ketertiban di jalan raya, dengan jalan tidak membiarkan menjamunya "polisi cepek" atau dengan sebutan lain "pak ogah" di perempatan-perempatan jalan dan tikungan-tikungan untuk balik kanan dan lain-lain, yang rawan terhadap pengrusakan kendaraan yang lewat serta kemungkinan kejahatan.

Sikap Polisi dalam bertugas tidak menggunakan kekerasan seperti yang dilakukan anggota Polri di Timtim (memukul rakyat) yang dilihat oleh seorang Senator USA yang berkunjung ke Dilli beberapa saat yang lalu.

Penanganan masalah "Ninja" yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, diharapkan Polri tidak melawan nuansa psikologis masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang

PEMBAHASAN

Pernyataan-pernyataan masyarakat tersebut cukup beralasan, menurut pengamatan penulis hal-hal tersebut dikuatkan dengan gejala-gejala atau kecenderungan di masyarakat, baik yang dapat diamati langsung dengan mata telanjang maupun yang dapat dibaca dalam media masa yang semakin terbuka, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

Indikasi adanya Ketidak Percayaan Masyarakat, antara lain : Masyarakat yang mendapat ketidakadilan atau bermasalah lebih senang melapor kepada Komnas Ham dari pada melapor kepada aparat kepolisian.

Pemberitaan-permemberitaan yang melansir pendapat-pendapat tokoh-tokoh masyarakat dalam menangani Kamdagri mendesak ABRI



Meningkatkan tali silaturahmi Polri dengan masyarakat, tidak hanya di tingkat Markas Besar, tetapi juga sampai ke tingkat Polda dan Kesatuan-kesatuan yang lebih bawah.

operasional yang belum atau tidak pas dikerjakan di lapangan.

Masyarakat cenderung tidak mau melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, bahkan terdapat pula yang main hakim sendiri. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan adanya pihak-pihak tertentu yang merasa lebih berwenang menyiapkan kesiagaan masyarakat melalui Siskam Swakarsa yang terlepas dari pembinaan Polri.

Masih dijumpai kecurigaan masyarakat adanya manipulasi kasus, penyimpangan penanganan kasus, yang ditangani Polri baik yang diberitakan di media massa (Kasus Perbankan), maupun kasus-kasus tertentu yang oleh masyarakat disampaikan pada pimpinan Polri, serta pengamatan kami pada kehidupan masyarakat dan pada saat bertugas di kewilayahan.

Masih dijumpai adanya badan-badan koordinasi dalam menjaga keamanan dalam negeri seperti Bakorstanas, Bakorinda, Bakorkama, TPHT, TP4 dan TP4-D dan sebagainya, yang pada hakekatnya melemahkan kewenangan Polri. Adanya Badan-badan ini memberikan kesan seolah-olah Polisi tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Indikasi munculnya harapan masyarakat kepada Polri untuk mampu melindungi mereka secara lebih baik :

Harapan masyarakat agar Polri segera keluar dari ABRI yang banyak dikemukakan oleh



Masyarakat yang mendapat ketidakadilan atau bermasalah lebih senang melapor

kepada KOMNAS HAM dari pada melapor kepada aparat kepolisian.

Kesadaran masyarakat untuk tidak mau dipanggil oleh instansi lain (Kodam) dalam hal kecurigaan keterlibatannya dalam kasus pidana, dan hanya mau dipanggil oleh Polri.

Penggunaan Azas Supremasi Hukum dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mendorong Polri untuk meningkatkan ketrampilan profesionalnya di bidang penegakan hukum.

LANGKAH-LANGKAH YANG DISARANKAN

Untuk mengantisipasi tuntutan dan sekaligus harapan masyarakat yang bermata dua tersebut, maka pada hemat kami ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari

Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Polri saat ini luar biasa. Kalau dulu Polri dianggap tidak mampu, saat ini masyarakat bahkan seorang Menteri yang notabene berasal dari Militer, mau melaporkan kasusnya kepada Polri. Manipulasi Perbankan dilaporkan kepada Polri, dugaan kasus KKN (PT. Freeport) dilaporkan kepada Polisi, dan sebagainya.

Dalam menghadapi kondisi yang demikian, Polri tidak boleh main-main, Polri harus meninggalkan "budaya" masa lalu (manipulasi kasus, rekayasa atas perintah, setoran, pemerasan, suap menyuap, melakukan kekerasan terhadap terperiksa dan sebagainya). Polri harus tampil Bersih, jujur, adil, simpatik, profesional, proporsional, prosedural, progresif, proaktif, produktif dan sebagainya).

Dengan demikian kepercayaan yang telah diberikan masyarakat saat ini tidak rusak. Sekali Polri berbuat salah, akibatnya fatal, kepercayaan masyarakat luntur, hancur dan Polri akan lebih terpuruk lagi. Kini saatnya Polri menunjukkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, pembimbing masyarakat serta sebagai penegak hukum di negara tercinta ini. Polri tidak boleh kehilangan momentum.

Langkah mendesak untuk dilakukan

Kebijakan Kapolri 6 Pro 3 K harus betul-betul dihayati dan dilaksanakan dalam menghadapi dilema ini. Polri harus bersih, setiap petugas harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugasnya, yang dilaksanakan secara konsisten.

Dibidang Pembinaan ditegakkan betul peraturan-peraturan Disiplin terhadap prosedur, dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditekankan 3 (tiga) kebijaksanaan pokok :

Keteladanan, dalam bersikap, berpikir dan bertindak/berperilaku, yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dengan menerapkan kebijaksanaan 6 Pro dan 3 K, sehingga kepercayaan masyarakat dapat direbut dan dipelihara.

Penindakan Tegas, terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran, penyelewengan atau dengan kata-kata populer KKN, yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kesejahteraan Prajurit, harus ditingkatkan melalui Badan-badan usaha (Yayasan dan Koperasi Polri) secara lebih profesional pengelolaannya dengan mengembangkan kemitraan (Koneksn).

Di bidang Operasional, meningkatkan



Polri harus tampil
Bersih, jujur, adil,

masyarakat merasa diayomi, tidak dipersulit, tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan akhirnya kepercayaan masyarakat kepada Polri tetap dapat dipelihara.

Implementasi MOP dengan 4 Jiwa MOP, ditingkatkan pelaksanaannya di lapangan. Kelemahan manajemen operasional ini, mendorong Polri kearah sudut penilaian tidak mampu melaksanakan tugasnya oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu Empat Jiwa Mop terdiri dari :

- Perumusan Sasaran yang jelas,
- Penentuan Petugas yang jelas,
- Penentuan Cara Bertindak (CB) yang jelas,
- Penentuan Pengendalian Operasi yang jelas.

Penajaman Deteksi Intelijen, yang intinya adalah menghasilkan Prediksi Ancaman (AF, PH, FKK) yang jelas dalam kurun waktu tertentu (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan), sehingga dapat ditentukan Sasaran yang jelas dalam MOP.

Pemberdayaan Reserse Polri, dalam rangka menangani kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat, secara bersih dan profesional, sehingga kepercayaan masyarakat dapat tetap dipelihara.

Pemberdayaan Jalulintas, untuk menghi-



Perumusan
Sasaran yang jelas,
Penentuan
Petugas yang jelas,

Penentuan Cara
Bertindak (CB) yang jelas,
Penentuan Pengendalian Operasi
yang jelas.

Pemberdayaan Brimob dan kesatuan-kesatuan berseragam lainnya dengan meningkatkan mobilitas yang tinggi dalam kesatuan-kesatuan kecil (regu), didukung alat komunikasi yang handal, sehingga masyarakat betul-betul dapat dilindungi dan menghilangkan keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan aksi massa maupun kejahatan massal, isue kerusuhan dan sebagainya.

Sistem Informasi Manajemen, yang handal sehingga informasi dapat secara cepat terdistribusi baik horizontal, vertikal, maupun di-